

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri olahraga telah mengalami manfaat yang meningkat serta peluang yang berkembang melalui proses globalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Jarvie (2017), di era globalisasi olahraga membawa tantangan mendasar bagi organisasi olahraga, tetapi sekaligus membuka peluang sebagai kekuatan sosial untuk internasionalisme, rekonsiliasi atau dalam bahasa Yunani “*katalasso*”, dan pembagunan internasional. Selain itu, saat ini olahraga juga terkait dengan berbagai inisiatif pembangunan karena sering dianggap sebagai alat untuk mendukung pembagunan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, para pemimpin Timor-Leste juga berperan penting dalam menyusun kebijakan dan sistem perencanaan pembagunaan jangka panjang sesuai dengan konsep pembangunan nasional (*Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional (2011-2030)*) yang mempromosikan serta mendorong pembagunan olahraga dan dilaksanakan dalam periode 5 tahunan (2023-2028) melalui departamen pemerintah kontitusional IX atau pemerintah masa sekarang (*IX Governo Constituisional*), sebagaimana diatur dalam undang-undang atau *artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 46/2023*, pada tanggal 28 Juli 2023, memperhatikan pada persetujuan struktur organisasional dan fungsional dari suatu entitas, terutama Kementrian Pemudah Olahraga, Seni dan Budaya (*Ministerio da Juventude, Desporto, Arte e Cultura, MJDAC*), dengan rencananya bertujuan untuk mengembangkan termasuk membantu inisiatif para pemuda, seni, dan budaya untuk memperkuat persatuan nasional, dalam pemulihan, pertahanan dan pembagunan negara (Sarmiento, 2023).

Secara demografis, banyak negara yang menghadapi perubahan dengan penuh optimisme terutama untuk generasi muda melihat olahraga sebagai solusi untuk mengatasi perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum, pengganguran serta penyalahgunaan narkoba. Hal itu mengakibatkan munculnya organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organizations* (NGO) salah satunya *UN Millenium Development Goals* yang menggunakan olahraga untuk mencapai tujuan

tertentu (Hayhurst & Frisby, 2010). Seperti yang diungkapkan juga oleh Kay dan Bradbury (2009) bahwa keterlibatan dalam olahraga dinilai memberikan keterampilan hidup, kepemimpinan, pengetahuan sosial, dan nilai-nilai yang mencakup pada integritas, kerja sama tim, *fair play*, kejujuran, serta rasa tanggung jawab.

Namun, hasil positif yang diungkapkan oleh Kay dan Bradbury tidak terjadi secara alami melalui partisipasi semata. Artinya, berpartisipasi dalam aktivitas olahraga saja tidak cukup untuk menghasilkan dampak yang produktif dalam pengembangan olahraga. Akan tetapi, diperlukan juga kebijakan olahraga yang diatur secara sistematis, terstruktur, serta memiliki tujuan yang jelas. Coalter (2009) juga berpendapat bahwa walaupun terlibat dalam kegiatan olahraga menjadi sebagai mekanisme yang bermanfaat untuk pembangunan, namun itu bukanlah hal yang memadai untuk menghasilkan perubahan sosial.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hartmann (2003) yang menekankan bahwa unsur nonolahraga dari setiap intervensi berbasis olahraga yang menentukan kekuatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran ini telah memicu minat besar dalam penelitian untuk menginvestigasi pengaruh dari aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi yang telah membentuk sistem olahraga tertentu (Boshoff, 1997), dan beberapa telah mengkaji tantangan dan program pengembangan olahraga (Collins & Buller, 2000).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh De Bosscher et al., (2006) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang secara umum diakui sebagai penentu kesuksesan dalam olahraga elit. Pertama, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan individu-atlet, seperti keterampilan, motivasi, dan dukungan dari lingkungan terdekat, contohnya teman sebaya, orangtua dan pelatih (*micro-level*). Kedua, mencakup politik dan kebijakan olahraga (*meso-level*). Ketiga, merujuk pada konteks sosial dan budaya di mana individu atau atlet berasal (*macro-level*). Maka dari itu, ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian ketika pemerintah mempertimbangkan kebijakan terkait pengembangan olahraga.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dalam sektor pengembangan olahraga tidak bersifat statis. Artinya, seiring berjalannya waktu, tujuan, praktik,

agen utama, dan sumber daya yang terlibat dalam pengembangan olahraga juga dapat mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada perubahan definisi pengembangan olahraga. Hartmann dan Kwauk (2011) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama pada awal pembentukan teori di sektor olahraga dan pembangunan adalah keberagaman dan ketidakjelasan dalam pandangan mengenai pembangunan. Selain itu, pengertian dan definisi pengembangan olahraga berbeda dari berbagai lembaga, seperti badan pengatur olahraga, klub, perusahaan dan organisasi nonpemerintah. Dalam pengertian yang paling komprehensif pengembangan olahraga adalah upaya untuk meluaskan tingkat partisipasi dalam olahraga, dan yang kedua adalah upaya untuk meningkatkan kualitas prestasi atlet serta pengembangan pribadi (Côté & Hancock, 2016)

Berdasarkan konsep tersebut, sesuai juga dengan pendapat beberapa ahli yang menjelaskan bahwa ada beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian ketika para aparat pemerintah mempertimbangkan kebijakan terkait olahraga. Salah satunya Eather, et al (2023) menyebutkan bahwa aspek krusial tersebut, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga demi kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan interaksi sosial. Berbeda dengan D'Isanto, et al (2019), ia berpendapat bahwa kinerja olahraga merupakan hasil dari beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor genetik, lingkungan sosial, dan faktor pelatihan. Berbeda pula dengan Eather dan D'Istanto, Kendellen, et al (2017) menjelaskan bahwa pengembangan pribadi dapat mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan diri sendiri, seperti konsentrasi, tekad, penetapan tujuan, pengendalian emosi, dan juga keterampilan yang terkait dengan hubungan antar individu, contohnya sikap sportif, intergritas, kerja sama tim, dan sikap menghormati orang lain.

Jika dilihat dari defenisinya, menurut perspektif Astle (2014, hlm. 15), pengembangan olahraga sebagai: *The sustainable provision of, and access to, integrated pathways of relevant, appealing, and affordable sporting opportunities for individuals, irrespective of age, ability, interest, or gender, to participate, enjoy, and progress in a supportive environment that has the infrastructure and services, capable of offering high-quality experiences, that satisfy their diverse and changing needs, motivations and expectations, and ensure their continued involvement in*

sport. Artinya, konsep tersebut merujuk pada upaya untuk secara berkelanjutan menyediakan dan memberikan akses pada jalur terpadu dari peluang olahraga yang relevan, menarik, dan terjangkau bagi individu, tanpa memandang usia, kemampuan, minat, atau jenis kelamin. Tujuannya adalah agar individu dapat berpartisipasi, menikmati, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, yang dilengkapi dengan infrastruktur dan layanan yang mampu memberikan pengalaman yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan dan pengelolaan sistem pengembangan olahraga tidak boleh bersifat sekilas atau sembarangan, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan berkomitmen untuk mengembangkan olahraga secara terstruktur dan suportif. Pengembangan olahraga dapat dilihat sebagai suatu proses perbaikan terus-menerus dalam kinerja dan struktur program olahraga yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi kebugaran fisik untuk semua orang dan berfungsinya aktualisasi secara efektif (Federal Republic of Nigeria, 1989). Indikator-indikator tersebut meliputi kebijakan olahraga, personel olahraga, program olahraga yang berbasis kepada pelatihan dan kompetisi, keuangan, fasilitas dan sponsorship. Contohnya adalah negara Denmark dan Norwegia. Di dua negara tersebut, pemerintah mendukung kebijakan fasilitas dan memiliki sudut pandang bahwa kebijakan fasilitas dan kesejahteraan olahraga itu bagi semua orang. (Rafoss & Troelsen, 2010).

Keberhasilan dalam olahraga merupakan sesuatu yang terlatih dan terstruktur. Artinya, pembinaan olahraga dilakukan dengan pendekatan saintifik mulai dari pencarian bakat hingga proses pembinaan. Berdasarkan hal itu, Amuchie (1999) menyatakan bahwa olahraga merupakan cerminan masyarakat; kompetisi memberikan batu loncatan bagaimana kehidupan masyarakat, bekerja, berfikir dan bermain, serta merupakan barometer kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Jadi, perkembangan olahraga saja tidak cukup jika keberhasilannya hanya ditentukan oleh perolehan medali, khususnya medali emas atau rangking yang diraih dalam *event* olahraga seperti event olahraga nasional, atau pekan event olahraga yang diadakan di tingkat internasional seperti Sea Games, Asian Games dan Olympic

Games. Olahraga sebagai instrumen pembagunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas bukan hanya pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, melainkan juga untuk mencapai tujuan nasional antara kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Dadang, 2010).

Dalam hal ini, diperlukan strategi jangka panjang yang dilaksanakan dalam 20 tahunan dan jangka menengah dalam periode 5 tahunan yang tepat untuk menyintesis berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan olahraga. Karena itulah, dalam Rencana Strategis Pengembangan Olahraga Timor-Leste tahun 2011-2030: (1) mendukung dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sarana olahraga, pelatihan dan pengembangan atlet, manajemen tim dan kompetisi; (2) mendukung partisipasi masyarakat dan siswa dalam kegiatan olahraga melalui kompetisi klub olahraga komunitas dan sekolah; dan (3) rehabilitas infrastruktur olahraga dan pembagunan fasilitas baru, termasuk pusat kebugaran serba guna di setiap distrik, dan renovasi stadion dan kompleks olahraga nasional.

Selanjutnya, berdasarkan strategi jangka menengah dalam periode 5 tahunan (2023-2028), para pemerintah masa kini atau *IX Governo Constitucional da República Democrática de Timor-Leste*, sebagaimana dipimpin oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão yang memiliki otoritas sesuai dengan Konstitusi Negara dan Undang-Undang, dengan kebijakannya, terutama dalam olahraga memiliki peran yang vital bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pemuda, memalui keterlibatan dalam aktivitas olahraga memberi dampak yang positif untuk perkembangan pribadi, hubungan sosial, toleransi, dialog, kepemimpinan serta demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah berencana dan tetap berfokus serta berkomitmen terhadap visi dan kebijakannya yang ditetapkan sebelumnya sebagai berikut; 1) Menevaluasi dan melaksanakan rencana strategis pembagunan nasional yang telah disusun untuk pengembangan olahraga Timor-Leste; 2) memberikan dana untuk mendukung kegiatan olahraga di seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetisi dalam berbagai cabang olahraga, baik lokal hingga nasional; 3) mendukung partisipasi komunitas dan siswa dalam kegiatan olahraga melalui klub dan kompetisi olahraga komunitas dan sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kordinasi antara lembaga pemerintah seperti pemerintah

nasional, pemerintah lokal, dan lembaga pendidikan, upaya berkontribusi untuk pengembangan olahraga di tingkat masyarakat; 4) menjamin keterlibatan untuk kompetisi olahraga di tingkat universitas dalam CPLP dan ASEAN; 5) mengembangkan potensi atlet untuk mempromosikan dalam kompetisi olahraga elit; 6) mengembangkan pertandingan yang sehat di antara kelompok seni bela diri dengan tujuan mempererat persahabatan dan solidaritas di antara mereka, dengan harapan untuk mengilangkan sepenuhnya sikap kekerasan; 7) membangun infrastruktur olahraga baru.

Berdasarkan *Constituição da República Democrática de Timor-Leste* (Undang-Undang Dasar RDTL) pasal 1, ayat 1 merumuskan Timor-Leste sebagai negara Demokratis, berdaulat, dan bersatu berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat manusia. Secara akademis, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintah suatu negara yang semua warga negara mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan demi memperjuangkan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik (Dr. H. Amung Ma'mun, 2018, p. 92).

Menurut Kiewiet dan McCubbins (1991) dalam literturnya menjelaskan bentuk praktik demokrasi sistem politik melalui proses; 1) pemilihan yang bebas, adil, berulang dan kompetitif memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat secara efektif; 2) partisipasi mengandung arti bahwa semua pihak yang terpengaruh secara signifikan memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sementara pengecualian dan marginalisasi dihindari; 3) prinsip-prinsip demokrasi dijalankan sesuai dengan sistem dan aturan yang memastikan adanya debat yang adil dan transparan para pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan konsep proses demokrasi sistem politik yang dikembangkan oleh Riant Nugro dalam Ma'mun (2019) bahwa kongkrit praktik demokrasi sistem politik adalah pemilihan umum yang melahirkan kepemimpinan nasional, kepemimpinan nasional dengan kekuasaannya melahirkan kebijakan nasional, serta kebijakan nasional berujung pada pengalokasian anggaran.

kebijakan publik yang berkualitas ditata sesuai dengan situasi yang relevan serta merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merelisasikan tujuan dari negara. Hal ini menghasilkan demokrasi dan kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*. Oleh karena itu, pembangunan olahraga dapat dinilai sebagai bagian dari kebijakan publik karena berdekatan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Timor-Leste.

Berdasarkan konsep tersebut, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan konteks kebijakan nasional Timor-Leste, peran perdana menteri sangat esensial dan juga sebagai badan legislatif menciptakan kerangka hukum untuk kebijakan pembangunan olahraga pada masa depan agar dapat mengadaptasikan dengan persoalan global termasuk juga menyusun strategis untuk pembangunan olahraga dengan ideliasasi olahraga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Akan tetapi, proses demokrasi yang dijalankan sesuai dengan hakikatnya merupakan sebuah proses rekrutmen kepemimpinan dalam praktik pembuatan kebijakan, di mana konsep politik untuk pemerintahan yang demokratis dapat bermanfaat dalam pembangunan melalui kemitraan yang sejati (Santiso, 2001).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, ada beberapa kasus yang terjadi terkait dengan tata kelola kompetisi olahraga yang telah membuktikan bahwa prinsip tata pemerintahan yang demokratis dapat digunakan untuk memeriksa sistem pemerintahan struktur atau proses dan relasi pemangku kepentingan dalam mengatur lingkungan yang kompleks di dalam acara olahraga sehingga terjadi gambaran prinsip hubungan timbal balik (Parent, 2016). Oleh karena itu, sistem demokratis bertujuan untuk memastikan bahwa olahraga tetap terbuka untuk semua insan (Gustavo et al., 2011).

Secara historis, *República Democrática de Timor-Leste* merupakan negara termuda di Asia Tenggara dan sebagai salah satu negara yang merdeka di abad ke XXI (Baptista et al., 2018). Jika di lihat dari asal-usulnya, Timor-Leste telah mengalami proses penjajahan yang cukup panjang. Pada pertengahan abad ke- 16, dari tahun 1515 hingga tahun 1975, Timor-Leste berada di bawah kekuasaan Portugis (Zealand, 2009). Pada masa kolonial, Portugis mempromosikan olahraga modern,

tetapi hanya untuk peserta kelas elitisme (República & De, 2017) dengan tujuan membentuk kelas-kelas administratif kecil yang mampu dikelola secara efektif demi kepentingan terbaik koloni Portugis (Development Sector Human & East Asia and Pacific Region (The World Bank), 2004). Kemudian, dari tahun 1975 hingga 1999, Timor-Leste menjadi bagian negara Indonesia sebagai provinsi ke-27 dengan nama provinsi Timor-Timur ketika aktivitas olahraga merupakan instrumen pengendalian pergerakan warga negara dan kebijakan integrasi (República & De, 2017). Sebab itu, sebagian besar kegiatan olahraga dilakukan oleh organisasi militer atau pemerintah dan dalam hal ini dikendalikan oleh kebijakan militer negara. Dengan demikian, setelah kemerdekaan pada 20 Mei tahun 2002 hingga saat ini olahraga diakui sebagai komponen krusial dalam pengembangan modal sosial dengan tujuan untuk mencapai tujuan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Estrategis 2011-2030, serta untuk tujuan pembangunan yang diniatakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian (República & De, 2017). Oleh karena itu, pemerintah Timor-Leste juga menganggap pentingnya pengembangan olahraga karena olahraga dianggap sebagai sarana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan potensi manusia serta membentuk karakter dan identitas bangsa.

Dalam konteks ini, upaya untuk melatih dan mengembangkan olahraga harus terus ditingkatkan dengan metode yang tepat, terencana, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan strategis pengembangan olahraga, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan strategis pembangunan olahraga, salah satu tujuan olahraga di Timor-Leste adalah mencapai prestasi yang maksimum dalam persanigan yang tinggi. Prestasi olahraga merupakan hasil yang optimal yang dicapai oleh seorang atlet berupa kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan suatu tugas, baik dalam pertandingan beregu maupun perorangan. Untuk pelaksanaan pengembangan prestasi pengorganisasian menurut Undang-Undang dasar olahraga Timor-Leste, Pasal 3, bagian C, menetapkan bahwa mencapai kinerja tinggi dalam kompetisi mencakup persiapan progresif, pelatihan dan rencana partisipasi untuk setiap atlet (*Lei 1-2010 .Pdf*, n.d., p. 4008). Selanjutnya, visi pengembangan olahraga di Timor-Leste adalah membantu generasi milenial mengembangkan potensi jasmani, sebagai bangsa yang sehat, terpelajar,

beretika dan menjadi pemimpin yang banga sebagai orang Timor (Government of Timor-Leste, 2014). Maka dari itu, pemerintah Timor-Leste berupaya untuk meluaskan infrastruktur dasar olahraga dan mengembangkan infrastruktur publik untuk kemajuan kegiatan olahraga di tingkat nasional dan kota. Namun, dalam situasi terkini pada perkembangan olahraga, masih ada keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, serta belum adanya sistem yang telah ditetapkan untuk persiapan sebelum dan sesudah kompetisi. Pengetahuan yang dimiliki oleh pelatih juga terbatas dalam mengajar atlet, dan sampai saat ini, bangsa ini masih belum memiliki keahlian yang memadai dalam aspek bidang olahraga (República & De, 2017, p. 1491).

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Umum Negara tahun 2020, yang disetujui untuk program pemuda dan olahraga di *República Democrática de Timor-Leste*, terutama difokuskan pada pembangunan infrastruktur olahraga sesuai dengan rencana strategis pembangunan nasional 2011-2030 (Das, 2020). Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada perubahan sosial, ekonomi dan infrastruktur di Timor-Leste. Terlihat bahwa penggunaan anggaran bervariasi dari tahun ke tahun. Total anggaran yang dialokasikan dari tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2020 adalah \$14.272.680, sementara jumlah dana yang dieksekusi adalah \$8.165.341, mewakili sekitar 57% dari total anggaran yang telah dialokasikan selama periode tersebut. Dana tersebut digunakan untuk 16 proyek yang bertujuan untuk membangun 4 stadion, termasuk pembangunan stadion sepak bola di Baucau, Maliana, Ermera, dan Manufahi. Saat ini, empat proyek sedang berlangsung, enam proyek telah selesai sejak tahun 2011, tetapi enam proyek lainnya masih belum mendapatkan pendanaan.

Diantara lain, berdasarkan Laporan Magang Profesional atau *Relatório de Estágio Profissional* yang dilakukan oleh Pereira (2020a, p. 62) mengungkapkan bahwa masalah utama dalam pendidikan di Timor-Leste yaitu kekurangan sumber daya manusia dalam pendidikan jasmani dan olahraga (PJO) di tingkat sekolah umum hingga universitas. Masalah tersebut menjadi kritis karena sebagian besar guru yang memiliki pelatihan *Sekolah Guru Olahraga* (SGO) pada masa Timur-Timur menjadi bagian dari Indonesia tinggalkan Timor-Leste pasca kemerdekaan.

Setelah 10 tahun Independensi, masih kekurangan jumlah guru pendidikan jasmani dan olahraga di Timor-Leste, pemerintah mengambil inisiatif dan berkolaborasi dengan universitas publik yaitu Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (UNTL). Pada tahun 2010, pendidikan jasmani dan olahraga didirikan di *Faculdade de Educação Artes e Humanidade*, UNTL atas inisiatif dari *Secretário Estado do Juventude e Desporto* (SEJD) untuk menciptakan program studi pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, dari tahun 2010 hingga 2019 di Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (UNTL) 70 orang berhasil lulus dalam program tersebut. Namun, jumlah ini dianggap sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Timor-Leste, terdapat total 1073 sekolah dasar tingkat 1 dan 2 atau *Ensino Básico 1º e 2º Ciclo* dan 2, 245 sekolah dasar tingkat 3 atau *Ensino Básico 3º Ciclo*, serta 91 sekolah menengah dan sekolah teknik. Dengan demikian, jumlah lulusan yang dihasilkan masih jauh cukup untuk mencukupi kebutuhan sumber daya di seluruh sekolah di Timor-Leste.

Dalam tinjauan penelitian yang dilakukan oleh Paulino (2021, p. 161), meskipun budaya olahraga telah dikenal dan cenderung berakar dalam masyarakat Timor-Leste, tetapi masih diperlukan upaya besar untuk meningkatkan praktik olahraga yang efektif. Dengan demikian, perlunya penyelidikan yang lebih mendalam yang mencakup berbagai visi strategis dalam pengembangan olahraga dengan mengusulkan langkah-langkah konkret yang melibatkan perumusan kebijakan upaya mendorong perubahan dalam sektor olahraga. Sebagai hasilnya, penulis berencana untuk mengisi rumpang penelitian ini melalui penelitian dengan memperluas rekomendasi yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Maka, penulis berkeinginan meneliti secara mendalam mengenai Dampak Demokrasi Sistem Politik Terhadap Kebijakan dan Pengembangan Olahraga di Timor-Leste.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana demokrasi sistem politik berperan dalam memengaruhi kebijakan dan pengembangan olahraga di Timor-Leste. Berangkat dari perihal tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak, perubahan, dan dinamika

yang terjadi dalam sektor olahraga Timor-Leste sebagai akibat dari penerapan demokrasi sistem politik. Judul yang diambil adalah “*Dampak Demokrasi Sistem Politik Terhadap Kebijakan dan Pengembangan Olahraga di Timor-Leste*”

Agar penelitian tersebut mengarah kepada pokok masalah yang diteliti, rumusan masalah tersebut diuraikan melalui pertanyaan dan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana demokrasi sistem politik di Timor-Leste untuk meningkatkan fasilitas olahraga?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam olahraga mengalami perubahan setelah diperkenalkannya demokrasi sistem politik?
- c. Bagaimana perubahan politik dan stabilitas politik memengaruhi perkembangan pendidikan olahraga di Timor-Leste setelah diperkenalkannya demokrasi sistem politik?
- d. Bagaimana perubahan politik dan stabilitas politik memengaruhi pencapaian olahraga prestasi Timor-Leste di tingkat nasional dan internasional?
- e. Bagaimana sistem pengalokasian anggaran dan jumlah besarnya bagi pembinaan dan pengembangan olahraga di Timor-Leste?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dampak demokrasi sistem politik terhadap peningkatan infrastruktur olahraga di Timor-Leste periode 2023-2028 .
- b. Untuk mengetahui dampak demokrasi sistem politik terhadap partisipasi masyarakat dalam olahraga di Timor-Leste periode 2023-2028.
- c. Untuk mengetahui dampak demokrasi sistem politik terhadap sistem dan pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga di Timor-Leste periode 2023-2028.
- d. Untuk mengetahui dampak demokrasi sistem politik terhadap sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Timor-Leste periode 2023-2028.
- e. Untuk mengetahui sistem pengalokasian anggaran dan besarnya untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Timor-Leste dan mengetahui

mekanisme kebijakan dalam demokrasi berkontribusi pada alokasi dana yang adil dan efektif untuk pengembangan olahraga periode 2023-2028.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman tentang perkembangan olahraga di Timor-Leste.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana faktor politik mempengaruhi sektor olahraga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas olahraga di Timor-Leste sehingga dapat meningkatkan pengalaman masyarakat dalam berolahraga.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan mengubah pemahaman dalam partisipasi masyarakat yang dapat membantu untuk merancang program-program olahraga yang lebih menarik dan inklusif.

c. Manfaat Kebijakan

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih efektif dalam pengalokasian dana dan sumber daya untuk sektor olahraga.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mendorong perubahan dalam kebijakan olahraga yang lebih mendukung partisipasi masyarakat dan perkembangan infrastruktur olahraga.

d. Manfaat Sosial

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mendorong adanya perbaikan fasilitas olahraga dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Timor-Leste.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan peran penting olahraga dalam membangun komunitas yang lebih kuat dan memperkuat hubungan sosial yang diperlukan.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam bagian ini menjelaskan sistematika penulisan tesis yang berisi rincian mengenai urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam tesis. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi tesis. Bab II berisi kajian pustaka yang mempunyai peran sangat penting, yaitu sebagai landasan teoretis dalam menyusun pertanyaan penelitian melewati kerangka pemikiran serta pembahasan-pembahasan yang akan dikaji. Sementara itu, Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, populasi dan sample, teknik analisis data dan terakhir analisis keabsahan data.

Selanjutnya, bab IV menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari seluruh rangkaian yang telah di lalui dalam penelitian, sedangkan bab V berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis yang telah di kaji, kemudian penulisan saran atau rekomendasi disajikan setelah kesimpulan.